

POLA KOMUNIKASI PEMBANGUNAN TERKAIT PENGELOLAAN PROGRAM INOVASI DESA MENUJU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

¹Ninik Tri Wahyuni, ²Rachmat Kriyantono, ³Zulkarnaen Nasution

^{1,2} Program Studi Studi Ilmu Komuniiasi Universitas Brawijaya

³Universitas Negeri Malang

Email: niniktw.ntw@gmail.com

Abstrak: Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui apakah model komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tegalgondo dalam Progam Inovasi Desa sebagai pemanfaatan Dana Desa telah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat menuju pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan focus pada pola komunikasi yang dipergunakan, faktor pendorng dan penghambat serta rancangan model komunikasi yang efektif. Pengumpul data utamanya dengan wawancara dengan informan kunci kepala desa dan perangkatnya serta beberapa warga. Untuk menganalisis data, dalam penelitian ini dipergunakan analisis data dengan pendekatan fenomenologi. Untuk menjaga kualitas data menggunakan pengecekan dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi dalam pelaksanaan pola komunikasi pembangunan. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam program inovasi memiliki pola komunikasi yang berbeda karena stakeholder yang terlibat juga berbeda. Selain itu, tidak meratanya komunikasi dalam penyampaian program kegiatan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Komunikasi Pembangunan, Pengelolaan Program, Inovasi Desa, Pemberdayaan Masyarakat

Abstact. The aim to be achieved is to find out whether the development communication model carried out by the Tegalgondo village government in the Village Innovation Program as the utilization of the Village Fund has been able to increase community participation towards empowering village communities. To achieve this goal, this study uses descriptive research with a focus on the communication patterns used, the driving and inhibiting factors and the design of effective communication models. The main data collector is through interviews with key village head informants and their apparatus and some residents. To analyze data, this research uses data analysis with a phenomenological approach. To maintain data quality using checking with triangulation. The results showed that the Village Head had an important role to convey information in the implementation of development communication patterns. The implementation of each activity in the innovation program has a different communication pattern because the stakeholders involved are also different. In addition, unequal communication in the delivery of program activities can affect the level of community participation.

Keyword: Development Communication, Program Management, Village Innovation, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Program Inovasi Desa (PID) merupakan program inovasi atau pembaharuan dalam praktik pembangunan di desa sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa dalam praktik pembangunan dan mendorong penguasaan pengetahuan pada warga desa untuk mendukung percepatan ekonomi (Berdesa, 2019).

Program Inovasi Desa (PID) sebenarnya sudah ada sejak tahun 1998 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK), kemudian awal tahun 1999 dirubah menjadi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PPKP), dan tahun 2007 dirubah lagi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.

Dari Permendes Nomor 48 tahun 2018 diketahui bahwa pemerintah

mengucurkan dana sebagai anggaran untuk membiayai Program Inovasi Desa. Dalam arahnya, Menteri Desa dan PDTT menekankan inovasi desa pada dua sektor, yaitu pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pasca panen serta sektor pariwisata. Alasan memilih sektor pariwisata dalam Program Inovasi Desa adalah karena pariwisata dianggap relatif mudah dan cepat untuk mengangkat dan meningkatkan ekonomi desa (Kompas.com).

Dengan adanya dana yang langsung mengucur ke desa, Pemerintah Desa kini mempunyai otonomi untuk melakukan pembangunan swakelola di wilayah masing-masing. Swakelola yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah swakelola type IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan / atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola. Hal ini sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (Amal, 2016).

Pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap dalam mewujudkan masyarakat mandiri yang mampu mengenali masalahnya dan dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut (Nasor, 2015). Suharto (2006) menjelaskan bahwa pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya seperti memiliki kepercayaan diri dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Salah satu contoh hasil penelitian berkait pemberdayaan adalah penelitian Sinollah (2019), dimana program

Simpan Pinjam Perempuan dalam PNPM-MP telah dapat memberdayakan masyarakat Desa Payaman dalam meningkatkan usahanya.

Dalam upaya pemberdayaan tersebut tentu memerlukan peran penghubung antara sumber ide perubahan dengan target masyarakat yang diharapkan dapat mengadopsi ide yang ditawarkan oleh produsen ide dan teknologi (Anwar, 2013) yang biasa disebut agen perubahan atau *change agent*. Masih menurut Anwar (2013), agen perubahan wajib memahami *channel of communication* agar mampu menyampaikan pesan perubahan melalui orang – orang yang tepat dengan model komunikasi yang mudah dipahami sehingga proses adopsi ide dan teknologi berjalan efektif dan memberi keuntungan yang nyata bagi masyarakat.

Dalam Program Inovasi Desa, yang menjadi pelaku pemberdayaan masyarakat atau agen perubahan adalah tokoh masyarakat dan kepala desa yang bertindak sebagai penghubung dan penggerak masyarakat (Nasution, 2014). Tokoh masyarakat dan kepala desa diharapkan dapat berbagi informasi dalam sistem sosial masyarakat untuk menciptakan temuan (*innovator, regulator*) dengan target perubahan (*kelompok masyarakat*) dan berbagi informasi diantara sesama mereka agar mampu membangun situasi saling pengertian melalui penjelasan dalam menjalin hubungan antara agen perubahan dan kelompok masyarakat yang menjadi target perubahan (Prasetyo, 2017).

Untuk menjalin hubungan yang baik antara agen perubahan dengan masyarakat target perubahan, maka diperlukan tindakan yang sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat binaan (Nasution, 2015) serta perlu pemilihan pola komunikasi yang tepat dalam menyampaikan informasi sesuai dengan karakter masyarakat yang menjadi target perubahan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Desa Tegalgondo dianggap menarik untuk sasaran penelitian karena Desa Tegalgondo adalah desa tempat peneliti bertempat tinggal. Sebagai desa yang terletak diperbatasan Kabupaten dan Kota Malang dengan warga yang majemuk karena banyaknya warga pendatang yang menetap di Desa Tegalgondo, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana komunikasi pembangunan terkait Program Inovasi Desa dilakukan, sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan pola komunikasi pembangunan yang telah dilakukan di Desa Tegalgondo menuju pemberdayaan masyarakat.

Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu program inovasi di masyarakat. Dari penelitian terdahulu, ada peneliti yang menerangkan bahwa kesadaran akan manfaat, dukungan pemerintah, dukungan manajemen puncak, dan dukungan finansial merupakan penentu penting dari berhasilnya program pedesaan di Bangladesh (Hoque et al., 2016). Penelitian lain menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa, dan pendampingan desa dari pemerintah daerah perlu ditingkatkan guna membantu desa untuk mewujudkan pelaksanaan program di desa (Fauzi Asni, 2013).

Penelitian lain mengatakan bahwa kekuatan yang dimobilisasi oleh tindakan partisipatif dengan pengembangan inovasi pedesaan menumbuhkan kekuatan sosial-budaya yang mengakar. Upaya memberdayakan masyarakat dengan memasukkan suara-suara yang terpinggirkan dalam program pembangunan, diakui sebagai kekuatan dalam penciptaan pengetahuan yang

menjadi bagian integral dari sebuah partisipasi masyarakat. Namun demikian, lembaga pendanaan dan organisasi pembangunan pedesaan setempat dapat mempertimbangkan metode sebagai alat yang berharga untuk membantu kelompok yang terpinggirkan dalam mengakses dana inovasi (Richardson-Ngwenya et al., 2019)

Dalam penelitian lain juga mengatakan, suatu perencanaan pembangunan dikatakan partisipatif bila memenuhi ciri-ciri terfokus pada kepentingan masyarakat, partisipatoris, dinamis, sinergisitas dan legalitas. (Sigalingging & Warjio, 2014). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan baik apabila masyarakat ikut berpartisipasi, kemampuan aparat dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan partisipatif memadai dan tim delegasi desa atau kelurahan mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada Musrembang kecamatan dan kabupaten sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat dan pemerintah mempunyai peran terkait tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang partisipatif menjadi amanat undang-undang yang harus dilakukan oleh pelaku pembangunan yang diregulasikan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi produk hukum ini sekaligus meretas kebuntuan paradigma pembangunan top down menjadi pembangunan bottom up ini sebagai model partisipatoris yaitu model melibatkan masyarakat dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian Astuti (2001) yang menyampaikan bahwa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya telah mempraktikkan berbagai model pembangunan lewat

beragam pendekatan dalam mempersepsi pembangunan. Mulai dari model cetak biru sebagai wujud pendekatan model dominan yang diadopsi dari negara maju dengan asas sentralisasi sampai dengan model proses yang mencoba menengahkan wajah pendekatan pembangunan yang lebih manusiawi, yaitu lewat konsep bottom up dalam perencanaan pembangunan, yaitu alternatif konsep pembangunan dengan pendekatan desentralistik yang bertitik tolak dari pendekatan partisipatif lewat gerakan pemberdayaan masyarakat sehingga dihasilkan kemandirian wilayah yang merupakan kunci keberhasilan dari kebijakan otonomi daerah.

Melihat penelitian di atas, maka komunikasi partisipatif memegang peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Komunikasi partisipatif adalah sistem inovasi yang diarahkan terutama untuk menerapkan pendekatan komunikasi bottom-up dan partisipasi masyarakat. Komunikasi partisipatif memberikan ruang bagi orang untuk bertukar informasi dan pengetahuan, serta penerapan prinsip komunikasi partisipatif dilakukan melalui dialog (Muchtart, 2016). Untuk meningkatkan proses komunikasi partisipatif, fasilitator harus melakukan pendekatan yang lebih intensif dan melibatkan masyarakat yang dianggap sebagai pemimpin kelompok masyarakat untuk aktif. Komunikasi partisipatif harus dijaga melalui berbagai program sedemikian rupa sehingga pembangunan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Demikian pentingnya komunikasi partisipatif yang seharusnya dipelopori oleh mereka yang berperan sebagai komunikator agen perubahan di desa. Stakeholder adalah aktor utama pembangunan yang menentukan proses, hasil, implementasi dan evaluasi Forum Perencanaan Pembangunan / Musrenbang (Sulaiman et al., 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pemangku kepentingan, aspirasi, dan akses

ke media informasi memiliki korelasi yang signifikan dengan intensitas pemangku kepentingan komunikasi dalam Musrenbang di tingkat desa dan kelurahan.

Suatu penelitian mengatakan manajemen pendidikan berbasis masyarakat dan seruan untuk perubahan perspektif terkait dengan bagaimana kita berpikir tentang konteks yang terpinggirkan dan berpenghasilan rendah adalah contoh fokus yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan analisis kritis program "Pendidikan dengan Partisipasi Masyarakat". Mengingat ketenaran dan fakta tiruannya di tempat lain, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana program ini beroperasi di tingkat lokal yang terkait dengan teori sistem, modal sosial, dan pemberdayaan (Edwards, 2019). Oleh karena itu penelitian saat ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : "Apakah pola komunikasi pembangunan yang dilaksanakan di Desa Tegalgondo telah memberikan output atau dampak terhadap partisipasi masyarakat sebagai suatu bentuk pemberdayaan?"

Kontribusi tentang pentingnya komunikasi partisipatif dalam pembangunan juga telah diungkap oleh (Chandanabhumma et.al., 2019) yang mengatakan bahwa komunikasi partisipatif berbasis masyarakat dan mendapat dukungan masyarakat adalah mitra yang adil dalam mengatasi kesenjangan karena menciptakan ruang partisipatif dan memberi sinyal "suara komunitas," yang berpusat pada peran kolektif, minat, dan pandangan dunia. Pendekatan yang berpusat pada budaya untuk memeriksa ekspresi suara masyarakat menghasilkan nilai positif antara lain : 1) dasar pemikiran dari masyarakat, 2) peran mitra masyarakat, 3) hasil kemitraan berpusat pada masyarakat, dan 4) elemen proses yang partisipatif.

Peran komunikasi dalam pembangunan menurut Hedebrö (dalam

Gumgum Gumilar, 2011) mencakup (i) Komunikasi dapat menciptakan ikhlim bagi perubahan dengan membujuk nilai-nilai, sikap mental dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi; (ii) Komunikasi dapat mengajarkan ketrampilan-ketrampilan baru; (iii) Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan; (iv) Media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri, sehingga mengurangi biaya psikis yang ekonomis untuk menciptakan kepribadian yang mobile; (v) Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata; (vi) Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dari masa transisi; (vii) Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di tengah masyarakat; (viii) Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat yang bercirikan tradisional, dengan membawakan pengetahuan kepada massa. Mereka yang beroleh informasi, akan menjadi orang yang berarti dan para pemimpin tradisional akan tertantang oleh kenyataan bahwa ada orang-orang lain yang juga mempunyai kelebihan dalam hal memiliki informasi; (ix) Komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang mengatasi kesetiaan-kesetiaan lokal; (x) Komunikasi dapat membantu mayoritas populasi menyadari pentingnya arti mereka sebagai warga negara, sehingga dapat membantu meningkatkan aktivitas politik; (xi) Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk; (xii) Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial dan politik menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri (*self-perpetuating*).

Dari pendahuluan dan landasan teori ini, peneliti merumuskan hipotesis bahwa

“pemerintah Desa Tegalondo telah menerapkan pola komunikasi pembangunan partisipatif dalam upaya pemberdayaan masyarakat.” Hipotesis ini yang akan dibuktikan dalam penelitian ini, dengan melihat pendapat dari pemerintah desa dan dipadukan dengan pendapat pengurus lembaga yang ada di Desa Tegalondo.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif menurut Kriyantono (2014) adalah jenis survey untuk menggambarkan populasi yang sedang diteliti dengan fokus pada perilaku yang sedang terjadi. Sedangkan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain – lain secara holistik dan dengan cara deskripsi bentuk kata – kata dan bahasa (Moleong, 2017), dan bertujuan untuk menjelaskan fenomena – fenomena melalui pengumpulan data sedalam – dalamnya.

Mengacu pada definisi Harold D. Lasswell yang mengatakan bahwa komunikasi adalah penyampaian pesan seorang komunikator kepada komunikan dengan media tertentu dan efek tertentu, maka fokus penelitian ini juga tidak lepas dari definisi tersebut.

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tegalondo terkait pelaksanaan Program Inovasi Desa?
2. Apakah faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat ?
3. Bagaimana rancangan model komunikasi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Untuk menjawab tujuan dan focus penelitian, peneliti dalam mengumpulkan

data menggunakan wawancara mendalam dan dibantu dengan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah semua perangkat desa yang ada di Desa Tegalgondo dan beberapa warga di Desa Tegalgondo yang semuanya berjumlah 21 orang. Untuk menganalisis data, dalam penelitian ini dipergunakan analisis data dengan pendekatan fenomenologi ini mengikuti langkah – langkah Moustakas (1994). Untuk menjaga kualitas data menggunakan pengecekan dengan triangulasi (Sugiyono, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pola Komunikasi Pembangunan Terkait Program Inovasi Desa di Desa Tegalgondo Tahun 2019

Pola Komunikasi Pelaksanaan Program Inovasi Desa Tahun 2019 Antara Pemerintah Desa Tegalgondo Dengan Tokoh Masyarakat

Dalam Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas–batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa.

Di desa Tegalgondo yang pada tahun 2019 menerima Dana Desa sebesar Rp. 828.095.000,-, menurut ibu Sanik Darwati selaku Sekretaris Desa Tegalgondo telah melakukan beberapa tahapan untuk mengkomunikasikan tentang dana tersebut kepada msyarakat. Hal itu ditunjukkan pada hasil wawancara peneliti dengan beliau yang dalam menjawab pertanyaan peneliti, responden sering menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia.

Dari penjelasan informan diketahui bahwa proses awal pihak pemerintahan desa Tegalgondo untuk mengkomunikasikan Program Inovasi Desa adalah dengan sosialisasi Musrenbang. Masyarakat dikumpulkan di balai desa untuk menerima informasi bahwa desa telah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah dan akan diwujudkan dalam Program Inovasi Desa. dari Musrenbang tersebut akhirnya dibentuk TPK (Team Pelaksana Kegiatan) yang terdiri dari anggota masyarakat itu sendiri. Selain memberikan informasi secara langsung, pemerintah desa juga menginformasikan Program Inovasi tersebut melalui media massa berupa banner yang dipasang di tempat – tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat dan melalui sosial media, yaitu melalui pesan whatsapp serta instagram.

Dari penjelasan itu, diperoleh gambaran tentang apa yang disampaikan oleh Everet M. Rogers (1985) mengenai difusi yang merupakan suatu proses menyampaikan atau pengkomunikasian suatu program inovasi kepada anggota dalam satu sistem sosial sudah mulai dilaksanakan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa setelah masyarakat dikumpulkan dan diberi informasi, masyarakat akan melakukan musyawarah di masing – masing dusun untuk menentukan usulan apa yang akan diangkat dari masing – masing dusun yang disebut Musdus (Musyawaran Dusun). Musdus menampung usulan dari masing – masing

RT/RW, yang kemudian disepakati jenis kegiatan mana yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Kesepakatan tersebut kemudian dibawa ke Musrenbang.

Alur PID sama dengan penyusunan RPJMDesa sebagai dasar pemerintah desa menyusun RKPDesa dan APBDDesa, hanya substansi PID adalah membuat kegiatan yang bersifat inovatif yang akan dilaksanakan secara swakelola. Dalam melaksanakan program inovasi, menurut Permendes Nomor 11 Tahun 2011, pemanfaatan Dana Desa harus murni tanpa ada tambahan sumber dana yang lain. Proses pencairan Dana Desa dibagi menjadi tiga tahap dengan jumlah 40%, 40% dan 20% dari jumlah dana keseluruhan yang akan diterima. Tidak terkecuali di Desa Tegalondo.

Pola Komunikasi Yang Diterapkan di Masing – Masing Kegiatan

a. Pola Komunikasi Kegiatan Program Pasar Wisata Desa

Pengadaan pasar wisata desa didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah Desa Tegalondo merasa perlu untuk memunculkan suatu inovasi baru yang sebelumnya tidak ada, yang nanti diharapkan bentuk inovasi itu akan meningkatkan Penghasilan Asli Desa (PAD) dan meningkatkan perekonomian warga yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah.

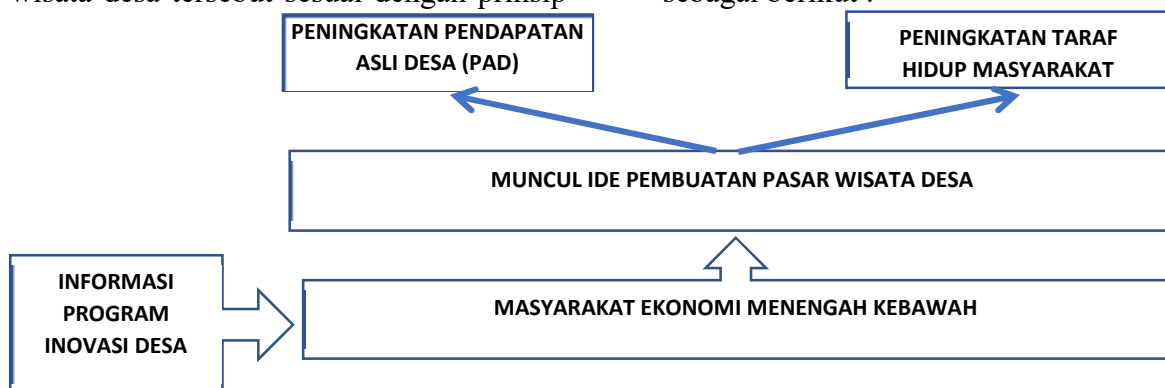
Pengadaan pembangunan pasar wisata desa tersebut sesuai dengan prinsip

pola komunikasi pembangunan bottom up karena model perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan yang kemudian bersama – sama atasan menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan dan atasan berfungsi sebagai fasilitator.

Hal ini juga sesuai dengan prinsip pemberdayaan yang dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Noor (2011), yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mempersiapkan masyarakat dengan memperkuat kelembagaan agar masyarakat mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang mengajak masyarakat untuk memiliki inisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam upaya memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Sehingga disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat akan dapat terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bagaimana keberadaan pasar wisata tersebut telah dapat mengangkat perekonomian warga Desa Tegalondo kelas menengah kebawah.

Jika diwujudkan dalam bentuk gambar, maka pola komunikasi kegiatan pembangunan pasar wisata desa adalah sebagai berikut :



Gambar 1 : Bagan Alur Pola komunikasi Kegiatan Pembangunan Pasar Wisata

b. Pola Komunikasi Kegiatan Pavingisasi, Kegiatan Sudetan, Kegiatan Drainase dan Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga

Kegiatan pavingisasi, kegiatan sudetan, kegiatan drainase dan kegiatan pembangunan gedung olah raga dilaksanakan setelah pemerintah desa menginformasikan perihal perolehan Dana Desa saat pertemuan sosialisasi Musrenbang dan meminta masing – masing dusun mengajukan usulan kegiatan. Hal ini disikapi Kepala Dusun dengan mengumpulkan RT/RW di wilayahnya dan diajak mengadakan Musyawarah Dusun (Mudus) yang hasil rapat nanti akan dibawa ke Musrenbang.

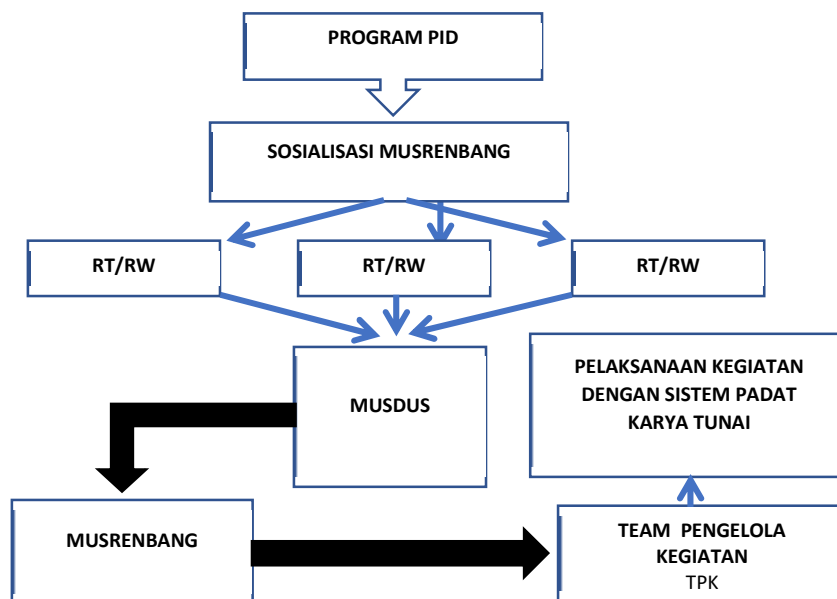
Pelaksanaan kegiatan pavingisasi, kegiatan sudetan, kegiatan drainase dan kegiatan pembangunan gedung olah raga melalui program Padat Karya Tunai, artinya dengan menggunakan tenaga dari warga yang belum mempunyai pekerjaan atau pengangguran dengan ongkos dibawah

standart.

Panitia pelaksanaan kegiatan pavingisasi, kegiatan sudetan, kegiatan drainase dan kegiatan pembangunan gedung olah raga ini diserahkan kepada Team Pengelola Kegiatan (TPK) masing – masing dusun, sehingga untuk masing – masing kegiatan pavingisasi mempunyai panitia yang berbeda.

Jika dirangkum, maka pelaksanaan pola komunikasi kegiatan pavingisasi adalah perpaduan antara teori top down dan bottom up. Di saat pemerintah menyampaikan ide, maka masyarakat dengan berdasarkan kondisi yang ada memunculkan suatu ide pavingisasi dengan masyarakat sendiri yang melakukan kegiatan melalui sistem Padat Karya Tunai, dan pemerintah desa hanya sebagai pembuat regulasi. Hal ini juga sesuai dengan prin swakelola, yang pelaksanaan kegiatan berpusat kepada masyarakat.

Pola komunikasi terkait kegiatan pavingisasi adalah sebagai berikut :



Gambar 2 : Pola komunikasi Top Down dan Bottom Up Kegiatan Pavingisasi

c. Pola Komunikasi Kegiatan Pembangunan Wisata Taman Baca

Kegiatan pembangunan taman baca untuk tahun 2019 masih dalam tahap awal

dan akan difokuskan untuk Dana Desa Tahun 2020. Sehingga pada saat peneliti melakukan penelitian yang terlihat

kebanyakan tanah kosong dari keseluruhan lahan yang nanti akan digunakan.

Adanya wisata taman baca diharapkan dapat meningkatkan minat membaca warga terutama anak – anak dan remaja yang kebanyakan lebih menyukai gadget dari pada membaca. Rencana tempat wisata taman baca yang berada di lahan pengairan Kaliparon juga dianggap strategis karena berdekatan dengan Kampus 3 UMM, sehingga diharapkan ada sinergi

antara warga Desa Tegalgondo dengan mahasiswa UMM.

Namun untuk pengadaan wisata taman baca, pemerintah desa masih ada kendala dengan adanya satu warung warga yang belum mau pindah tempat meskipun sudah diinformasikan bahwa tanah tersebut akan dibangun.

Pola komunikasi pengadaan wisata taman baca sesuai dengan model S – O – R Komunikasi Pembangunan, yaitu :



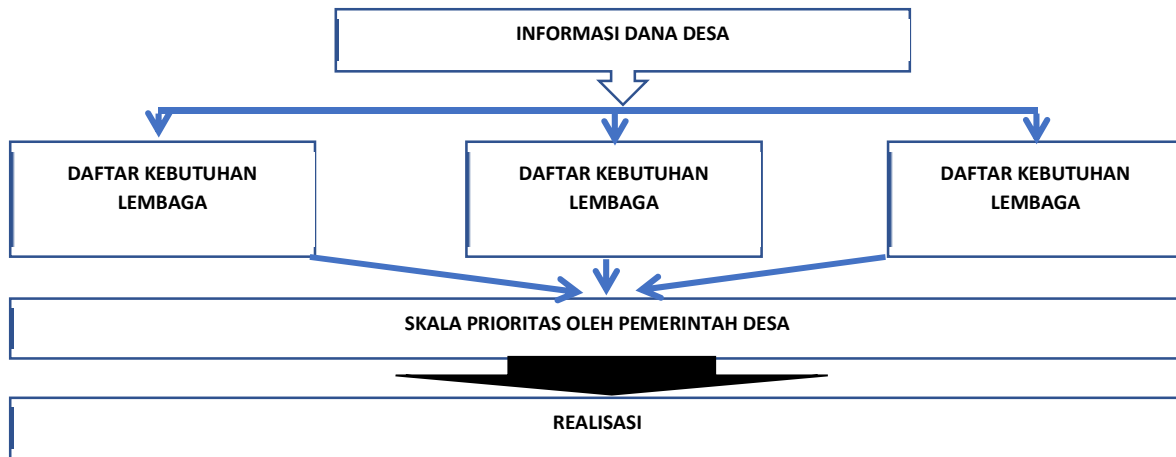
Gambar 3 : Pola Komunikasi S – O – R Kegiatan Taman Wisata Baca

d. Pola Komunikasi Kegiatan Pengadaan Sarpras Lingkungan, Kegiatan Pengadaan Sarpras Pendidikan, dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa

Kegiatan pengadaan sarpras lingkungan, kegiatan pengadaan sarpras pendidikan, dan kegiatan perencanaan pembangunan desa memiliki pola komunikasi yang sama. Yaitu setelah pemerintah desa menginformasikan, masing – masing lembaga membuat daftar kebutuhan dan mengajukan ke pemerintah desa. dan semua usulan tersebut akan dikoreksi dan dibuat skala prioritas untuk menentukan mana yang lebih dulu akan dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan teori komunikasi pembangunan top down yang berbentuk perintah, sifat sederhana dan tidak bertele – tele dan cara penyajian melalui lisan. Pendekatan ini tepat dilakukan apabila pemimpin memiliki pengetahuan tentang masalah dan solusi yang linier.

Pola komunikasi kegiatan pengadaan sarpras lingkungan, kegiatan pengadaan sarpras pendidikan, dan kegiatan perencanaan pembangunan desa adalah :



Gambar 4 : Pola Komunikasi Top Down Kegiatan Pengadaan Sarpras Lingkungan, Kegiatan Pengadaan Sarpras Pendidikan, dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa

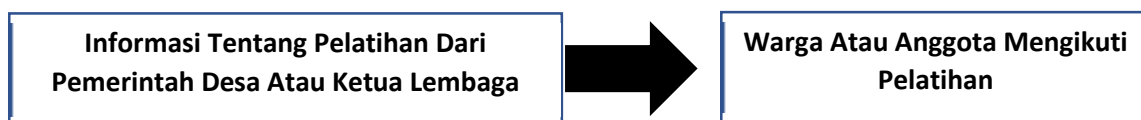
e. Pola Komunikasi Kegiatan Pendayagunaan Kelembagaan Desa, Kegiatan Pelatihan Perangkat, dan Kegiatan Pelatihan Masyarakat

Kegiatan pendayagunaan kelembagaan desa, kegiatan pelatihan perangkat, dan kegiatan pelatihan masyarakat menggunakan model komunikasi yang bersifat satu arah. Lembaga mengkomunikasikan pesa – pesannya melalui sebuah saluran kepada penerima pesan atau khalayak.

Dalam hal ini pemerintah desa atau lembaga menginformasikan kepada warga atau anggota bahwa akan ada kegiatan pelatihan dan meminta anggota mengikuti pelatihan tersebut. Dan di pemerintahan desa hal ini biasanya melalui kasi pemerintahan. Namun karena Dana Desa yang dialokasikan untuk kegiatan pelatihan

tidak begitu banyak, maka ketua lembaga biasanya mengambil inisiatif dengan menggunakan sistem *songgo bareng* untuk memenuhi kebutuhan lain dari pelatihan tersebut. Misalnya pengadaan konsumsi kegiatan dibagi secara sukarela ke istri perangkat. Namun ketua lembaga lebih mengutamakan kegiatan menyangkut PHBN atau PHBI.

Pola komunikasi yang digunakan adalah S –R (*Stimulus -> Respon*). Model komunikasi ini merupakan model komunikasi yang paling sederhana dibanding model lain. Pemerintah desa atau kepala lembaga memberikan ide menginformasikan gagasan, dan warga atau anggota merespon ide atau gagasan tersebut dengan ikut berperan aktif dalam kegiatan.



Gambar 5 : Pola Komunikasi S – R Kegiatan Pendayagunaan Kelembagaan Desa, Kegiatan Pelatihan Perangkat, dan Kegiatan Pelatihan Masyarakat

f. Pola Komunikasi Kegiatan Insentif Guru PAUD dan Guru TPQ, dan Kegiatan Kesehatan

Kegiatan pemberian insentif guru PAUD dan guru TPQ bertujuan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan dari pemerintah kepada guru PAUD dan pengelola TPQ yang sudah memberikan kontribusi dalam hal pemberdayaan masyarakat terutama pendidikan. Dalam pemberian insentif ini, guru PAUD dan

TPQ cukup dengan membawa foto copy KTP sebagai syarat pengambilan, sehingga pola komunikasi S – R adalah dianggap paling tepat.

Sedang kegiatan kesehatan disini meliputi pengadaan obat – obatan untuk bidan desa, pembagian dana PMT untuk balita dan lansia, penyuluhan kesehatan, voging dan sejenisnya yang berada dilingkup bidang kesehatan.



Gambar 6 : Pola Komunikasi S – R Kegiatan Pemberian Insentif Guru PAUD dan Guru TPQ dan Kegiatan Kesehatan

g. Pola Komunikasi Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat akan berkaitan dengan pengadaan pasar wisata desa, karena pemerian bantuan ke warga yang mempunyai usaha atau menambah modal koperasi belum diagendakan untuk tahun 2019. Pernyataan Sekretaris Desa sejalan dengan hasil wawancara dengan ketua Koperasi Wanita bahwa koperasi untuk tahun 2019 tidak mendapat bantuan dana yang berasal dari Dana Desa, tapi untuk tahun 2018 memperoleh.

Dari hasil wawancara tersebut, maka kegiatan pengembangan ekonomi dikorelasikan dengan adanya pasar wisata, tentang bagaimana warga memanfaatkan pasar wisata tersebut untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka.

Tingkat Keaktifan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Inovasi

Tingkat keaktifan masyarakat dalam melaksanakan program inovasi dapat dilihat dari jumlah lembaga pemerintah

yang aktif dan warga yang mau berperan serta dalam program inovasi terutama bagi warga yang belum atau tidak mempunyai pekerjaan. Seperti kita ketahui dari profil Desa Tegalondo, jumlah lembaga yang ada di masyarakat adalah 7 lembaga dan 3 Gapoktan. Dari ketujuh Lembaga yang ada, hanya 2 lembaga (Karang Taruna dan LPM) yang tidak berperan aktif

Dan dilihat dari jumlah penduduk, maka diketahui bahwa jumlah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan sebanyak 663 penduduk dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 6.674 jiwa. Dan didalam RAB disebutkan bahwa untuk kegiatan inovasi dilaksanakan dengan cara menggunakan 40% dari dana keseluruhan untuk sistem Padat Karya Tunai, dengan gaji perhari Rp. 60.000,-. Dari penjelasan tersebut diperoleh data perkegiatan menggunakan tenaga Padat Karya Tunai sebanyak 49 orang.

Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa di Desa Tegalondo Tahun 2019

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa telah berupaya menentukan jenis kegiatan yang berpusat pada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah, gagasan dan ide diambil dari permasalahan yang ada di masyarakat serta menggunakan sistem Padat Karya Tunai dalam pengerjaannya. Artinya dengan mengadakan program yang didasarkan pada kondisi ekonomi masyarakat serta menggunakan tenaga kerja warga dari yang tidak atau belum memiliki pekerjaan dalam pengerjaan program inovasi, meskipun dengan gaji dibawah standart sesuai dengan juknis, hal itu tentu akan menjadi pendorong partisipasi masyarakat.

Pemerintah Desa Tegalondo juga menggunakan sistem Padat Karya Tunai sebagai pendorong partisipasi masyarakat menuju pemberdayaan masyarakat. Selain itu penyebaran informasi melalui kegiatan di masyarakat juga dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

Namun ada beberapa hal yang menjadi hambatan pelaksanaan program inovasi di Desa Tegalondo, diantaranya seperti yang disampaikan informan bahwa kebanyakan masyarakat tidak aktif adalah hambatan tersendiri dalam pelaksanaan program inovasi. Sedikitnya pengetahuan tentang program yang dimunculkan belum dapat membuat warga masyarakat menjadi percaya dengan manfaat dari program yang ada. Namun bagi masyarakat yang tidak aktif, pemerintah desa mempunyai solusi pemberian pembinaan tentang pentingnya partisipasi bermasyarakat untuk kepentingan bersama.

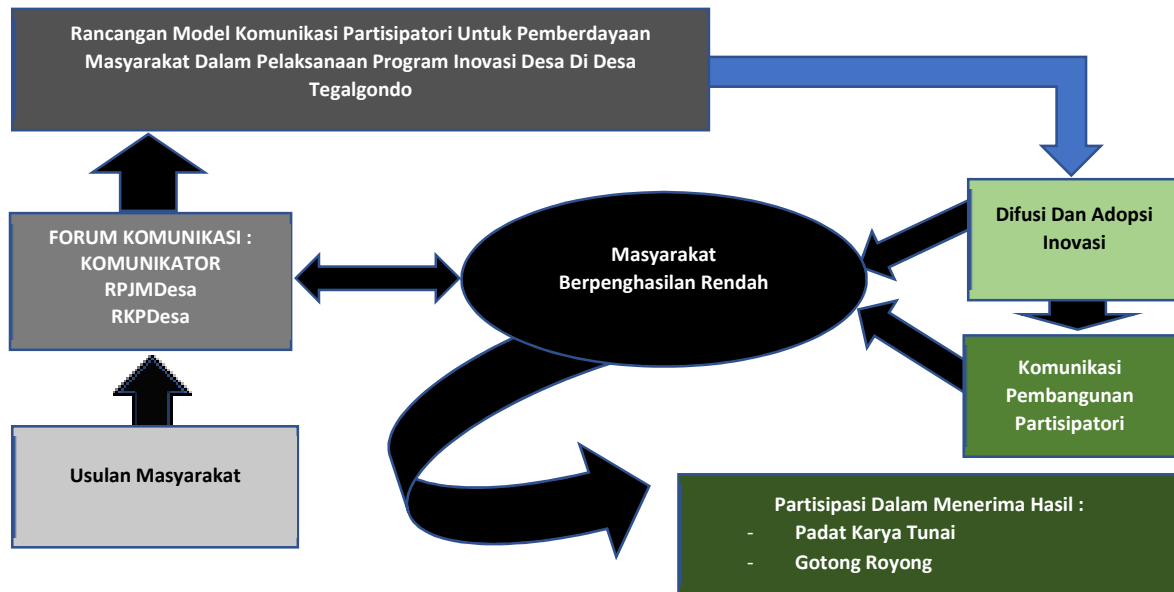
Pada kesempatan lain peneliti menanyakan kepada warga mengapa tidak mau aktif dalam pembangunan, informan menyampaikan bahwa informasi yang disampaikan pemerintah desa kurang merata sehingga ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui tentang program

inovasi yang direncanakan.

Hambatan lain juga disampaikan informan bahwa Dana Desa tidak bisa sepenuhnya bisa memenuhi biaya pembangunan. Jikalau bisa tentu memerlukan waktu yang lama sementara pemerintah desa mengetahui bahwa Dana Desa akan berhenti sewaktu – waktu, sehingga timbul kekhawatiran bahwa program kegiatan belum selesai dilaksanakan tetapi dana dari pemerintah sudah berhenti. Dan ini memunculkan ide untuk mengajak kerja sama pihak ketiga. Pihak yang memiliki modal sehingga diharapkan dapat membantu percepatan pelaksanaan pembangunan.

Analisis Rancangan Model Komunikasi yang Efektif untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Berdasarkan data – data yang diperoleh peneliti melalui wawancara yang mendalam dan penelusuran dokumentasi pada lokasi penelitian, maka peneliti dapat mengilustrasikan rancangan model pendekatan komunikasi pembangunan partisipatori alah sebagai berikut:



Gambar 7 : Ilustrasi Peneliti Rancangan Model Komunikasi Pembangunan Partisipatori Program Inovasi Desa Tegalgondo Menuju Pemberdayaan Masyarakat

Dari gambar tersebut maka rancangan model komunikasi partisipatori dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa sangat diperlukan. Berawal dari forum komunikasi dalam pelibatan secara aktif peran komunikator, penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa yang kemudian menampung usulan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kemudian penerapan difusi dan adopsi inovasi yang ditunjang dengan penerapan komunikasi partisipatori diharapkan dapat menghasilkan partisipasi masyarakat dalam menerima dan melaksanakan program inovasi, baik secara gotong royong maupun Padat Karya Tunai.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program yang dirancang secara swakelola dengan menitik beratkan pada partisipasi masyarakat melalui sistem gotong royong dan Padat Karya Tunai dirasa masih ada kendala karena kurang meratanya informasi di masyarakat. Kepala Desa memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi dalam pelaksanaan pola komunikasi

pembangunan. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam program inovasi memiliki pola komunikasi yang berbeda karena stakeholder yang terlibat juga berbeda. Selain itu, tidak meratanya komunikasi dalam penyampaian program kegiatan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Rini Dwi. (2001). Analisis Makro Kinerja Pasar Modal Indonesia dengan Pendekatan Error Correction Model (ECM). *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang*. Vol. 6. No. 1. Hal 13- 32.
- Chandanabhumma, P. P., Duran, B. M., Peterson, J. C., Pearson, C. R., Oetzel, J. G., Dutta, M. J., & Wallerstein, N. B. (2019). Space within the Scientific Discourse for the Voice of the Other? Expressions of Community Voice in the Scientific Discourse of Community-Based Participatory Research. *Health Communication*, 1–12.

- <https://doi.org/10.1080/10410236.2019.1581409>
- Edwards, D. B. (2019). Shifting the perspective on community-based management of education: From systems theory to social capital and community empowerment. *International Journal of Educational Development*, 64 (November 2018), 17–26.
<https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.11.004>
- Fauzi Asni, F. A. (2013). The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau). *IOSR Journal of Business and Management*, 10(4), 1–9. <https://doi.org/10.9790/487x-1040109>
- Gumilar, Gungum. Peranan Komunikasi Dalam Pembangunan. diakses dari <https://emilianshah.files.wordpress.com/2011/08/peranan-komunikasi-dalam>. Tanggal 1 Maret 2020
- Hoque, M. R., Saif, A. N. M., AlBar, A. M., & Bao, Y. (2016). Adoption of information and communication technology for development: A case study of small and medium enterprises in Bangladesh. *Information Development*, 32(4), 986–1000.
<https://doi.org/10.1177/0266666915578202>
<http://www.berdesa.com/> diakses tanggal 10 Desember 2019
<https://nasional.kompas.com/read/2017/08/16/20434941/kpk-akan-awasi-penggunaan-dana-desa> diakses 11 Desember 2019
- Kompas.com dengan judul "BPS: Jumlah Desa Tertinggal Berkurang 6.518Desa",
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/133742026/bps-jumlah-desa-tertinggal-berkurang-6518-desa>.
- Penulis: Murti Ali Lingga. Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan, diakses 19 September 2019
- Kompas.com dengan judul "KPK Akan Awasi Penggunaan Dana Desa",
- Kriyantono, R. (2014). *Public Relation Perspektif Barat dan Lokal*, Jakarta: Prenada Media
- Moeleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Rosdakarya.
- Moustakas, Clark. (1994). *Phenomenological research methods*. California: SAGE
- Muchtar, K. (2016). Penerapan komunikasi partisipatif pada pembangunan di Indonesia. *Jurnal Makna.*, 1(1), 20–32.
- Nasor, H.M. (2015). Komunikasi Interpersonal Orang Tua Muslim Dalam Pembinaan Akhlak Remaja: Studi di Kelurahan Way Huwi Jati Agung Lampung Selatan. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 8(1). Hal. 67-89
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 88.
<https://doi.org/10.2307/257670>. Poerwanto.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Permendes Nomor 48 tahun 2018, tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa.
- Richardson-Ngwenya, P., Restrepo, M. J., Fernández, R., & Kaufmann, B. A. (2019). Participatory video proposals: A tool for empowering farmer groups in rural innovation processes? *Journal of Rural Studies*, 69, 173–185.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.02.022>

- Rogers., Evert., M. (1985). *Komunikasi dan Pembangunan Perspektif Kritis*, Jakarta: LP3ES
- Sigalingging, A. H., & Warjio. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2(Desember 2014), 118.
- Sinollah, Sinollah. (2019). Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam Pnpm-Mp Untuk Kesejahteraan Masyarakat: Study kasus di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 31-38.
<https://doi.org/10.36636/dialektika.v4i2.347>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi. (2006). *Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama. Bandung
- Sulaiman, A. I., Lubis, D. P., Susanto, D., & Purnaningsih, N. (2015). Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 367.
<https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1467>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional